

4.1.9. URUSAN PENANAMAN MODAL

a) Kondisi Umum

Terbatasnya sumber daya modal adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh kebanyakan daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, sementara di sisi lain kebutuhan peningkatan pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan dalam upaya pemerintah daerah mendorong kegiatan ekonominya seoptimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Kotawaringin Barat masih memerlukan sejumlah tambahan dana dalam bentuk investasi swasta, baik yang berasal dari investor dalam negeri maupun investor asing.

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat menyimpan beberapa peluang seperti spesifikasi keunggulan lokal Kabupaten Kotawaringin Barat di bidang pariwisata dan budaya, komitmen pemerintah daerah yang terbuka untuk investor, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Adapun isu strategis yang mengemuka dalam peningkatan investasi terkait pada persaingan global dengan negara lain serta investasi yang mengarah pada keunggulan lokal Kabupaten Kotawaringin Barat. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menjadi fokus perhatian dalam pengembangan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni realisasi investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil, investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan, perlunya peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lain (termasuk kesiapan lahan), regulasi yang mantap dalam fasilitasi investasi, serta upaya peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-negara maju.

Perkembangan investasi pada sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan. Namun demikian, masih banyak sektor lain yang masih potensial untuk dikembangkan, sehingga sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan potensi daerah. Salah satu kendala pelaksanaan investasi di daerah adalah adanya aturan dari pusat yang sampai saat ini masih dalam proses sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan regulasi yang tepat untuk lebih memberikan daya tarik bagi investor. Selain itu juga masih belum disahkannya RTRW Provinsi dan Kabupaten juga menjadi kendala utama dalam upaya menarik investor. Kondisi tersebut telah menyebabkan turunnya minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan investasi, baik untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha yang telah ada maupun untuk merintis investasi baru. Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas utamanya dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih banyak didominasi oleh konsumsi daripada investasi atau ekspor.

Salah satu tujuan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah agar masyarakat dapat menerima proses pelayanan yang lebih sederhana dan terkoordinasi dalam satu tempat (*one stop service*), dimana penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan dari mulai pendaftaran, penerbitan sampai dengan penandatanganan izin dilakukan pada satu tempat. Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut adalah mengembangkan sistem pelayanan perizinan yang Cepat, Tepat, Sederhana, Transparan dan Murah sehingga terjamin kondisi yang kondusif dan kesempatan yang sama dalam bekerja / berusaha.

Saat ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengembangkan aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat pada alamat website yaitu simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id. Website ini berguna untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat secara cepat, serta memberikan berbagai informasi perizinan dengan mudah.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 menangani beberapa jenis izin yaitu sebanyak 15 jenis izin yang berjalan sejak sebelum perubahan nomenklatur Dinas/ semenjak masih berstatus Kantor. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan / Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan jumlah yang sudah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebanyak 125 Perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Berikut ini adalah informasi tentang jenis dan realisasi Perizin/ Non Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

Tabel 4.22
Jenis dan Realisasi Perizinan/ Non Perizinan yang diterbitkan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

NO.	JENIS IZIN USAHA	REALISASI 2016	TAHUN 2017		
			TARGET	REALISASI	%
1	2	6	3	4	5
1.	IMB	749	749	301	40,19
2.	SITU	587	587	459	78,19
3.	HO	496	496	368	74,19
4.	Reklame	0	0	0	
5.	TDP	389	389	302	77,63
6.	IUI	1	1	1	100,00
7.	TDI	3	3	7	233,33
8.	SIUP	363	363	260	71,63
9.	TDG/R	10	10	4	40,00
10.	IUA	0	0	0	-
11.	IT (Izin Trayek)	0	0	0	-
12.	IUA-PP	15	15	1	6,67
13.	IT-PP	0	1	2	200,00
14.	IBA dan Logpond	23	23	18	78,26
15.	IUJK	103	103	84	81,55
JUMLAH		2.739	2.740	1.807	65,95

Sumber : Bidang PTSP DPMPTSP

Berdasarkan tabel di atas, bahwa di beberapa izin mengalami penurunan realisasi dalam penerbitan, hal ini dikarenakan bisa terjadi karena jumlah usaha tidak mengalami peningkatan dan masa berlaku izin usaha belum habis/ belum saatnya memperpanjang izin usahanya. Sedangkan untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada beberapa faktor yang menyebabkan izin tersebut tidak bisa terbit salah satunya ada beberapa izin bangunan yang melanggar GSB.

Untuk informasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut berikut :

Tabel 4.23
Realisasi Pendapatan Retribusi
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2017

NO.	RETIBUSI	REALISASI 2016	TAHUN 2017		
			TARGET	REALISASI	%
1	2		3	4	5
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.843.897.572	2.624.937.000	1.011.256.100	38,52
2	Izin Gangguan (HO)	2.499.698.550	1.638.389.000	1.790.158.325	109,26
3	Denda Retribusi Perijinan Tertentu	18.611.997	17.000.000	14.681.748	86,36
	JUMLAH	5.362.208.119	4.280.326.000	2.816.096.173	65,79

Sumber : Bidang PTSP DPMPTSP

Pada tahun 2016 Realisasi PAD Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan sebesar Rp. 5.362.208.119,- sedangkan pada tahun 2017 ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi IMB sebesar Rp. 1.011.256.100,- dari targetnya yaitu Rp. 2.624.937.000,- juga Retribusi HO sebesar Rp. 1.790.158.325,- dari targetnya Rp. 1.638.389.000,- Serta Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp. 14.681.748,- dari targetnya Rp. 17.000.000 dengan demikian total PAD retribusinya sebesar Rp. 2.816.096.173,- dari target PAD sebesar Rp. 4.280.326.000,-

Untuk Penanaman Modal target dan realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal pada tahun 2017 dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.24
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Sasaran	Satuan	2017		
			Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (PMA/ PMDN)				
	PMA (US \$ dalam ribuan)	US \$	219.578,00	395.721,70	180,22
	PMDN (Rp. Dalam Juta)	Rp.	4.081.549,70	6.260.331,50	153,38

Sumber : Bidang Pengawasan dan Pengendalian DPMPTSP

Penjelasan dari capaian masing-masing indikator Sasaran tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini :

❖ Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Tahun 2017

Target Nilai Realisasi Nilai Investasi Tahun 2017 dan realisasi Nilai Investasi tahun 2017



PMA = Penanaman Modal Asing

PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian target Nilai Realisasi Penanaman Modal tahun 2017 terdiri dari realisasi investasi PMA sebesar US \$ 395.721,70 dan realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 6.260.331,50 Juta. Nilai realisasi investasi PMA tahun 2017 ini meningkat 180,22 % dari target sebesar US \$ 219.578,00 dan realisasi investasi PMDN tahun 2017 sebesar 153,38 % dari target Rp. 4.081.549,70 juta.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Dalam melaksanakan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.934.619.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.566.469.304 atau 80,97 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.25
Program/ Kegiatan Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun Anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	DPMPSTP	1.934.619.000	1.566.469.304	93,62	80,97				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	907.286.700	787.360.546	86,78	98,51	Meningkatnya Pelayanan administrasi Pekantoran	100	98,51	%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	207.504.000	150.973.715	72,76	100,00	Kelancaran pembayaran tagihan rekening	12	12	Bulan
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.600.000	599.000	16,64	100,00	Kelancaran tugas operasional dilapangan dapat teratasi	9	9	Unit
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	205.708.500	199.836.783	97,15	100,00	kelancaran tugas perkantoran dapat berjalan dengan baik	12	12	Bulan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	62.137.300	53.839.700	86,65	100,00	Tercapainya prosentase pegawai yang bersemangat melaksanakan kerja secara maksimal	12	12	Bulan
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	39.000.000	24.590.000	63,05	65,38	Peralatan kerja yang layak pakai untuk menunjang pelayanan	38	38	Unit
	Penyediaan alat tulis kantor	53.108.900	52.745.400	99,32	100,00	Terpenuhinya kebutuhan ATK Kantor	12	12	Bulan
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	149.460.000	145.710.000	97,49	100,00	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan/ fotocopy	12	12	Bulan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.550.000	7.550.000	100,00	100,00	tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9	9	Jenis
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.859.500	9.709.500	61,22	100,00	tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	3	Jenis
	Penyediaan peralatan rumah tangga	12.090.000	9.650.000	79,82	100,00	tersedianya peralatan rumah tangga kantor	3	3	Jenis

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Penyediaan makanan dan minuman	23.600.500	17.584.500	74,51	100,00	tersedianya makanan dan minuman tenaga kontrak dan arsiparis	4	4	Orang
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	127.646.000	114.571.948	89,76	100,00	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan ke pusat	45	31	Kali
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	278.182.000	252.088.909	90,62	100,00	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	%
	Pembangunan gedung kantor	17.500.000	17.500.000	100,00	100,00	Tersedianya nama/ Identitas Kantor	3	3	Jenis
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	155.682.000	154.770.000	99,41	100,00	Bertambahnya perlengkapan gedung kantor	6	6	Jenis
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	97.500.000	73.818.909	75,71	100,00	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kendaraan yang terpelihara	7	7	Unit
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.500.000	6.000.000	80,00	100,00	Jumlah AC yang terpelihara	15	15	Unit
3	Program peningkatan disiplin aparatur	36.790.400	36.790.000	100,00	100,00	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	100	%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	36.790.400	36.790.000	100,00	100,00	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	70	70	Setel
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	205.503.400	159.269.690	77,50	96,11	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100	96,11	%
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	205.503.400	159.269.690	77,50	96,11	Terlaksananya Bimtek aparatur	27	26	OK
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.651.500	4.420.500	95,03	100,00	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.550.500	1.342.500	86,58	100,00	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	10	Buku
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.550.500	1.547.500	99,81	100,00	Jumlah laporan keuangan semesteran	10	10	Buku
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.550.500	1.530.500	98,71	100,00	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	10	10	Buku
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	134.005.000	84.470.101	63,04	63,04		100	63,04	%
	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	30.425.000	5.337.101	17,54	17,54	Temu usaha besar dan UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi)	2	2	Kali

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Pengembangan potensi unggulan daerah	9.150.000	2.500.000	27,32	27,32	Pemutakhiran Data potensi dan peluang investasi Kab. Kobar	6		Kec
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	23.670.000	20.710.000	87,49	87,49	Telaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	22		Kali
	Penyelenggaraan pameran investasi	70.760.000	55.923.000	79,03	100,00	Keikutsertaan dalam Expo Kobar	1	1	Kali
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	145.000.000	103.344.900	71,27	71,27	Terlaksananya Program/ kegiatan yang mendukung dalam peningkatan iklim investasi	100	71,27	%
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	60.000.000	59.400.000	99,00	100,00	Terlaksananya Pengembangan aplikasi PMPTSP	1	1	Paket
	Kajian Kebijakan penanaman modal	85.000.000	43.944.900	51,70	51,70	Jumlah peraturan Produk hukum yang diterbitkan	4	4	Buah
8	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	223.200.000	138.724.658	62,15	95,18	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat dalam PTSP	100	95,18	%
	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	169.050.000	95.324.658	56,39	100,00	Tim teknis yang turun ke lapangan	12	12	Bulan
	Sosialisasi pelayanan perizinan	54.150.000	43.400.000	80,15	80,15	Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan	4	4	Kali

Sumber : DPMPTSP

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang terkait dengan Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Masih kurang representatifnya ruangan gedung kantor sehingga perlu adanya penataan ruangan dan pembangunan gedung arsip;
2. Kurangnya Anggaran SKPD untuk memenuhi kebutuhan peralatan kerja dan perlengkapan kantor, sehingga pelayanan belum begitu maksimal;
3. Sistem Informasi Promosi dan sistem informasi Pelayanan yang belum berjalan secara maksimal;
4. Rendahnya Perencanaan Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi seperti belum tersedianya RUPM, belum adanya data Potensi unggulan daerah serta belum maksimalnya pengawasan, pembinaan dan pengembangan BUMD;
5. Belum maksimalnya pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal sehingga Pengelolaan LKPM dan Pengelolaan data belum bisa berjalan secara optimal;
6. Kurangnya jumlah SDM dan tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja bidang Penanaman Modal dan PTSP, misalnya : ahli komputer, ahli dalam bidang pengelolaan database dan lain-lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Perlunya dukungan anggaran guna peningkatan fasilitas sarana dan prasarana;
2. Melaksanakan pengembangan aplikasi secara bertahap guna meningkatkan Informasi Promosi dan sistem informasi Pelayanan;
3. Penambahan anggaran untuk RUPM Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
4. Dilaksanakan pendataan Potensi unggulan daerah serta mengintensifkan pengawasan, pembinaan dan pengembangan BUMD;
5. Menambah jumlah personil/ Pegawai guna peningkatan pelayanan;
6. Mengirimkan/mengikutsertakan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pendidikan dan pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kompetensi kinerja pegawai diantaranya untuk program yang wajib ada seperti LKPM, SPIPESE dan RUPM;